

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
( Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :  
**RIAN ANDRIANTO**  
**NPM 1721020278**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
( Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**RIAN ANDRIANTO  
NPM 1721020278**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, MH

**FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021 M**

## ABSTRAK

Permasalahan sampah di Indonesia dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari menggunungnya sampah di tempat pembuangan sampah. Sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat. Permasalahan sampah di wilayah Lampung Barat mulai dapat terlihat dari banyaknya penumpukan sampah yang ada di wilayah Lampung Barat. Kurang baiknya dari tehnik operasional persampahan, kelembagaannya, dan terutama peran serta masyarakatnya yang tingkat kesadarannya masih rendah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk menghindari semakin banyaknya volume sampah yang ada di pemerintah Lampung Barat membuat Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1). Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ? (2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data penunjang atau data pelengkap dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana meskipun masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah dimanfaatkan menjadi pupuk organik, botol-botol plastik yang dijadikan keranjang belanja dan lain-lain. Adapun kendala yang ditemui diantaranya, penghentian sementara dalam pengelolaan sampah di pekon Purajaya dikarenakan belum ada tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa di kelola dan dimanfaatkan terpaksa di bakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMP (Badan Usaha Milik Pekon) Jaya Bersama Pekon Purajaya. Adapun menurut pandangan hukum Islam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pekon Purajaya menjadi hal yang berguna diantaranya lingkungan menjadi bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian Andrianto

NPM : 1721020278

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara ( Siyasaah )

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Januari 2021

Penulis



Rian Andrianto

NPM: 1721020278





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letkol: H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi  
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat  
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  
Sampah (Studi Di Desa Pekon Purajaya  
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung  
Barat)**

Nama Mahasiswa

**: Rian Andrianto**

Npm

**: 1721020278**

Prodi

**: Hukum Tatanegara ( Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas

**: Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Prof.Dr. Alamsyah, M.Ag.**

**NIP. 1970090111970310**

Pembimbing II

**Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**NIP.199009152019031018**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi**

**Ketua Prodi Hukum Tatanegara ( Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.S.I**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letkol.H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh, Rian Andrianto, NPM : 1721020278, program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis 22 April 2021

**Tim Penguji**

Ketua : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

Sekretaris : **Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.**

Penguji I : **Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**

Penguji II : **Prof.Dr. Alamsyah, M.Ag**

Penguji II : **Erik Rahman Gumiri, M.H.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khairuddin, M.H.**

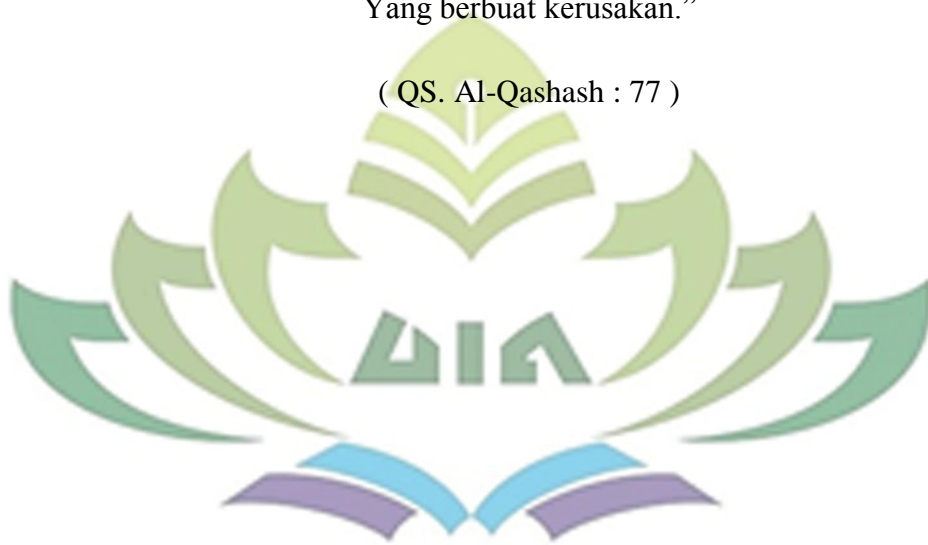
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi,  
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang  
Yang berbuat kerusakan.”

( QS. Al-Qashash : 77 )





### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Abidin dan Ibunda Juliyati tercinta yang telah membesarkan, mengasuh serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan penulis. Berkat do'a restu mereka berdua penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.

Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua penulis.






## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Rian Andrianto. Dilahirkan di Purajaya pada tanggal 18 Mei 1999, Penulis merupakan anak tunggal bagi Bapak Abidin dan Ibu Juliyati.

Riwayat Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Purajaya Kabupaten Lampung Barat diselesaikan tahun 2011, lanjut ke SMP Negeri 1 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat diselesaikan tahun 2014, SMA Negeri 1 Kebun Tebu Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Kabupaten Lampung Barat diselesaikan tahun 2017 dan langsung melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021 .

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Raden Intan Lampung (UKM ORI), terakhir penulis diamanahi untuk menjabat sebagai wakil ketua divisi futsal pada masa jabatan 2020/2021.



Bandar Lampung, 1 Mei 2021  
Yang Membuat,

Rian Andrianto

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT dan segala syukur penulis panjatkan kepada-Nya atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu limpahkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci serta kepada para sahabat dan pengikut beliau yang telah membawa risalah agama Islam yang sampai pada saat ini masih menjadi panutan bagi umatnya sampai akhir zaman kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari penulisannya maupun dalam mengungkapkan pendapat dari para pakar dibidangnya. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yakni dengan membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Mukri, M.Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, MH, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. H. A.Khumaidi Ja'far, MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, MH, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah.
6. Bapak Harto Wibowo SE, MM, Selaku Kabag TU Fakultas Syari'ah.
7. Bapak Frenki, M.S.I, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah.
8. Bapak Prof.Dr. Alamsyah, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Erik Rahman Gumiri, MH, Selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya Program Studi Hukum Tatanegara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
11. Teman-teman penulis, Annisa Julianingsih, Dea Anggeryani, Putri Rahmiyani, Ade Rahmad Kurniawan, Raharti, Anggi Febriyanti, Maharani, Dwi Fatmawati, Lukman, Devi Oktavia, Mifta Huda, Arliansyah, Usman dan seluruh teman temanku jurusan siyasah angkatan 2017 kelas C yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.

12. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 1 Mei 2021  
Penulis,

Rian Andrianto  
NPM. 1721020278





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO.</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul. ....	1
B. Latar Belakang Masalah. ....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian. ....	10
D. Rumusan Masalah. ....	11
E. Tujuan Penelitian. ....	11
F. Manfaat Penelitian. ....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan. ....	13
H. Metode Penelitian. ....	21
I. Sistematika Penelitian. ....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam Dan Perkembangannya. ....	30
1. Pengertian Hukum Islam. ....	30
2. Sumber Hukum Islam. ....	31
3. Macam-Macam Hukum Islam. ....	34
4. Tujuan Sistem Hukum Islam. ....	35
5. Klasifikasi Hukum Islam. ....	38
6. Lingkup Kajian Hukum Islam. ....	38
7. Pengertian Fiqh Siyasah. ....	40
B. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah . ....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH DIPEKON PURAJAYA KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT</b>	
A. Sejarah, Geografi Dan Kondisi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. ....	69
B. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. ....	78
C. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung	

Barat.....	88
D. Bentuk-Bentuk Penerapan Dan Contoh-Contohnya Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. ....	91
E. Keberhasilan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. ....	93
F. Faktor Kelemahan Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. ....	94
G. Faktor Pendukung Dan Kekurangan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. ....	96
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Dalam Pandangan Hukum Islam . ....	99
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Rekomendasi.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat
Lampiran 4	Surat Rekomendasi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 7	Foto Bersama Pengurus BUMP ( Badan Usaha Milik Pekon) Jaya Bersama Pekon Purajaya Bersama Warga pada saat Wawancara mengenai Objek yang

akan diteliti

**DAFTAR TABEL**

1. Daftar Pejabat Kepala Desa/Peratin Pekon Purajaya Dari Tahun 1954 Sampai Dengan Sekarang. ....	71
2. Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. ....	74
3. Data Penduduk Berdasarkan Kelulusan. ....	74
4. Data Penduduk Berdasarkan Agama. ....	74
5. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian. ....	75





## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Purajaya Kecamatan  
Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat..... 72



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Agar tidak mengalami kesalahpahaman mengenai isi dari judul skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi secara detail. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan “sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.”<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercantum dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum *Syara* atau *Syari’ah*.<sup>2</sup>
3. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 951.

<sup>2</sup> Bunyana Sholihin., *Metodologi penelitian syari’ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 1.

<sup>3</sup> Imron, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karaya Ilmu ( Jakarta : 1992 ), 78.

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>4</sup>
5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah<sup>5</sup>.

Beberapa istilah diatas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Lampung Barat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu.

## **B. Latar Belakang**

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dikenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup, Dalam Ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat (8)

<sup>5</sup> Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat (11)



atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (*waste*). Kecuali sampah (*refuse*), kotoran manusia (*human waste*), air limbah dan atau air bekas (*sewage*) serta sisa-sisa industri (*industrial waste*) termasuk pula ke dalamnya.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah (*refuse*) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya, berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri),tetapi yang bukan biologis karena *human waste* tidak termasuk ke dalamnya) dan umunya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan.

Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang,maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sanpah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi

dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya).

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:<sup>6</sup>

1. Penyimpanan sampah (*refuse stroge*)

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Jelaskan untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran, hotel dan lain sebagainya.

2. Pengumpulan sampah (*refuse collection*)

Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpulkan cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah. Lazimnya penanganan masalah ini dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat secara bergotong rotong.

3. Pembuangan sampah (*refuse disposal*)

Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan

---

<sup>6</sup>Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya,1996),56.

sampah atau pemusnahan ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan terhadap sampah.

Dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>7</sup>

Tugas pemerintah daerah dalam penanganan sampah terdapat didalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 dan pasal 7 yang berbunyi pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.<sup>8</sup>

Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah.
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6



4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
6. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
7. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan
8. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>9</sup>

Adapun wewenang dari bupati terhadap pengelolaan sampah terdapat didalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 8 yang berbunyi:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan.<sup>10</sup>

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* (Q.S. Al-Araf: 56)<sup>11</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi Allah SWT mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999).128.

kelakukan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. Mendaaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman.

Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandakan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Dalam hadis mengenai kebersihan ini juga dirangkai dengan pernyataan Rasulullah sebagai kebersihan sebagian dari iman, berzikir dengan membaca “Alhamdulillah” itu memenuhi mizan (timbangan) amal baik kelak di hari kiamat, Berzikir “Subhanallah walhamdulillah” pahalanya memenuhi kolong langit dan bumi, shalat itu cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, sabar itu sinar bagi umat Islam dan al quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat Pekon Purajaya cara pemanfaatan sampah yang benar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya Pekon Purajaya, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah yang tidak dapat dikelola harus dibakar dan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat pekon purajaya ataupun pekerja pengelolaan sampah yang ada di Pekon Purajaya. Sampah yang dapat dikelola hanya sampah organik yang akan dijadikan pupuk



organik tetapi permasalahan yang terjadi belum adanya penampungan tempat penjualan pupuk organik tersebut sehingga pupuk organik tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Pekon Purajaya tetapi tidak semua masyarakat Pekon Purajaya dapat menerima pupuk tersebut masyarakat masih lebih memilih pupuk pabrik sehingga pembuatan pupuk organik yang ada di Pekon Purajaya sementara waktu harus dihentikan karena tidak adanya biaya pemasukan dari memproduksi pupuk organik tersebut.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)"**.

### **C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian**

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus peneliatian adalah :

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah "(Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)"**.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah, Penelitian merumuskan Sub Fokus Penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Implementasi Pengelolaan Sampah
- b. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sampah

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum harus berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat umum , sedangkan tujuan khusus harus berhubungan dengan konsep-konsep yang

lebih spesifik di bandingkan dengan yang digunakan dalam perumusan masalah.<sup>12</sup>

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

#### 2. Tujuan Subjektif

- a. Kajian sesuai disiplin ilmu penulis tekuni.
- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan Siyasah di UIN Raden Intan Lampung.

### **F. Signifikasi Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan peneliti adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Study Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, dan diharapkan akan membawa

---

<sup>12</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008 ),30.

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritis yang luas terhadap hukum Islam.

### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini :

Resti Ramayanti (2017), Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro). Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sistem menabung di bank sampah cangkir hijau antara lain nasabah datang langsung ke bank sampah cangkir hijau metro dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan oleh nasabah, bagi nasabah yang tidak bisa datang langsung ke bank sampah cangkir hijau maka dapat menghubungi bank sampah cangkir sehingga akan ada karyawan yang menjemput sampah dari nasabah, untuk selanjutnya bagi yang belum memiliki nomor rekening maka akan diarahkan untuk membuka nomor rekening sekaligus mendapatkan buku tabungan pada meja *costumerservice*, selanjutnya nasabah akan diarahkan pada pemilahan dan penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan sekaligus mengetahui berat sampah yang akan di tabung, nasabah membawa slip



gudang yang berisikan rincian sampah kepada meja *costumerservice*, selanjutnya *costmerservice* akan menjelaskan produk-produk di bank sampah cangkir hijau dan nasabah di perkenakan untuk memilih salah satu dari produk tersebut, penginputan data pada bank sampah cangkir hijau sudah menggunakan sistem komputerisasi di mana data yang sudah diinput nantinya akan di posting dalam blog/website, selanjutnya nasabah menuju teller untuk menarik tunai ataupun mengambil buku tabungan. Selanjutnya setelah sampah dari nasabah terkumpul di bank sampah cangkir hijau maka para petugas bank sampah akan mendistribusikannya, Distribusi sampah dilakukan dengan menyeter sampah yang sudah terkumpul kepada pengepul sampah yang lebih besar selain itu, Pihak pengumpul sampah juga akan memberikan info terkait harga sampah yang mengalami fluktuatif setiap waktu. Dengan mengetahui perubahan harga maka pengelola bank sampah cangkir hijau akan menyampaikan kepada nasabah bank sampah. Sehingga ada transparansi harga kepada nasabah bank sampah cangkir hijau agar tidak terjadi transaksi yang dilarang oleh Islam. Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi diri sendiri, anak cucu dan alam sekitar, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut adil dalam segala aktivitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah. Berdasarkan ayat di atas bahwasanya praktek bank sampah di perbolehkan dalam Islam karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat

merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabzir yang dilarang dalam islam. Penelitian ini lebih fokus pada sistem menampung dibank sampah cangkir hijau, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus Implementasi Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya.<sup>13</sup>

Dominikus Baping (2015), Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa secara aplikatif pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai tempat, baik dijalanan, tempat-tempat umum maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Hal tersebut disebabkan terbatasnya kapasitas penampungan sampah sementara sehingga tidak mampu menampung volume sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan raya, sampah perkantoran maupun sampah industri. Kurang efektifnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong Tongkok dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi warga penduduk yang

---

<sup>13</sup>Resti Ramayanti, *Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2017), 81.

membuang sampah di sembarang tempat. Penelitian ini lebih fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya fokus terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya tetapi fokus juga terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya.<sup>14</sup>

Nino Heri Setyoadi (2017), Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor, Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah partisipatif berperan penting dalam memelopori, mengkampanyekan, dan mengelola sampah dilingkungannya. Dalam memelopori pengelolaan sampah, masyarakat kita masih membutuhkan figur teladan yang dapat dijadikan panutan. Tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah di kota bogor merupakan tokoh pemuda, ibu-ibu PKK hingga ketua RT/RW dan lurah, para tokoh pemuda memandang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai merugikan masyarakat dan harus dihentikan. Para pemuda tersebut mengambil resiko bertentangan dengan masyarakat umum ketika pemerintah berencana memfasilitasi TPS 3R di lingkungan mereka. Dengan kegigihan para pemuda, dampak positif pengelolaan sampah dengan pola 3R terhadap lingkungan dapat dibuktikan. Sehingga anggota

---

<sup>14</sup>Dominikus Baping, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Hasil Dari Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Administrative Reform, Vol. 3 No.3, September 2015.

masyarakat yang sebelumnya menolak, menjadi terlibat dalam pengelolaan sampah partisipatif. Peran tokoh perempuan yang bergerak dalam wadah gerakan PKK juga cukup signifikan. Gerakan PKK di Kota Bogor menjadi mitra Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah skala rumah tangga. Mereka bergerak aktif dilakukan penerapan TTG pembuatan kompos dengan metode takakura di kelurahan Cilendek Barat, Mekarwangi, Cibuluh dan Cibadak. Gerakan PKK juga dimanfaatkan oleh tokoh pemuda di kelurahan Mulyaharja untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah 3R di masyarakat. Selain itu, peran tokoh formal seperti ketua RT/RW dan lurah tidak kalah penting. Mereka yang selama ini memfasilitasi masyarakat dalam pemilihan lokasi 3R, mendukung KSM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) pengelola TPS 3R di lingkungan mereka. Tanpa dukungan dan fasilitasi ketua RT/RW dan lurah, keberadaan TPS 3R akan sulit diwujudkan. Dukungan tokoh formal semakin menguatkan kiprah para tokoh informasi yang bergerak dilapangan. Tokoh atau kader lingkungan sebagian besar merupakan inisiasi masyarakat yang didampingi oleh fasilitasi CSR swasta nasional melalui yayasan WALIBAR. Oleh karena itu peran LSM tersebut dalam menginisiasi dan mendampingi secara berkelanjutan sangat berarti bagi tumbuh dan berkembangnya kader-kader lingkungan di Balikpapan. Kader-kader lingkungan di Balikpapan mayoritas adalah ibu-ibu dan merupakan pengelola bank sampah di wilayah masing-masing. Di kota Balikpapan, keberadaan bank sampah sangat didukung oleh tokoh formal seperti ketua RT/RW, Bank Sampah di kota Balikpapan tersebar diberbagai lokasi meliputi bank sampah di kelurahan



Tegalsari, Batu Ampar, Graha Indah, Sepinggan, Damai Bahagia, Damai Baru, Gunung Bahagia, Gunungsari Ulu, Manggar, Manggar Baru, dan Karang Joang. Penyebaran Bank Sampah di berbagai kelurahan tersebut tidak lepas dari kontribusi tokoh LSM lingkungan dan yayasan WALIBAR. Selama ini Yayasan WALIBAR telah merintis pembentukan, melatih, dan membina beberapa bank sampah di kota Balikpapan, Yayasan WALIBAR selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama ibu-ibu Dasawisma, ketua RT dan RW dalam mengelola dan membina bank sampah, Penelitian ini lebih fokus pada peran Toko Masyarakat dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya Fokus terhadap Peran Aparatur Pemerintahan Pekon Purajaya Dalam Pengelolaan Sampah.<sup>15</sup>

Muchammad Zamzami Elamin (2017), Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, Hasil dari penelitian ini adalah Warga desa tidak memiliki tempat sampah untuk melakukan proses pewadahan sehingga warga terbiasa membuang sampah sembarangan dan membakarnya di sekitar rumah,. Hal ini menyebabkan sulitnya pengaplikasian pemilahan sampah, karena tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara, maka warga membuang sampah rumah tangga yang berskala besar di lahan kosong atau tambak yang dimanfaatkan menjadi tempat pembuangan akhir. Minim dan mahalnya lahan menyebabkan desa disanah tidak memiliki tempat untuk pembuangan akhir. Susahnya akses keluar masuk desa membuat warga kesulitan membawa sampah ke tempat pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat

---

<sup>15</sup>Nino Heri Setyoadi, Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor, *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 10 No. 1, Juli 2018.

akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga permasalahan sampah tersebut masih dipandang wajar. Menurut data penelitian dari karim, 2016 bahwa tingkat pendidikan warga desa disanah ditunjukkan dengan sebesar 123 orang tidak bersekolah, sebesar 240 orang lulusan taman kanak-kanak ( TK ), 167 orang lulusan sekolah dasar ( SD/MI ), 205 orang lulusan sekolah menengah pertama (SMP/SL TP), 185 orang lulusan sekolah menengah atas (SMA/SL TA), dan 20 orang lulusan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan cara mengelola sampah. Warga dengan pendidikan rendah hanya mengetahui cara mengelola sampah dengan dibakar tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Persebaran warga sehingga warga terpusat pada satu wilayah sehingga menyebabkan sampah berserakan di wilayah tersebut. Ada 3 tempat yang dimanfaatkan untuk tempat pembuangan sampah ilegal yaitu di daerah awal masuk pemukiman melalui jalur darat terdapat kolam di bagian kanan jalan dan dua yang lain berada di jalan menuju ke tambak yang dipenuhi sampah-sampah yang berada di beberapa titik di Desa disanah tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut menyebabkan berkurangnya keindahan alam desa disanah. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan karena bau kurang sedap yang muncul dari tumpukan sampah tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan sampah, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah di pekon purajaya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muchammad Zamzami Elamin, Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa DiSanah Kecamatan Sreseh, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. II No. 4, Juli 2018..

Rizki Puteri Makyudin (2017), Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan pengelolaan sampah yang utama adalah sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan pengelolaan TPA dengan sistem yang tidak tepat (masih berfokus pada lahan urug). Pengelolaan TPA terpadu merupakan suatu kebutuhan penting manusia. Keberadaan TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah sepatutnya diadakan dengan pertimbangan keamanan ketat terhadap pencemaran untuk masa sekarang dan mendatang. TPA telah menjadi salah satu cara penanganan sampah akhir yang populer karena sangat sulit untuk memusnahkan atau mengurangi jumlah produksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi sampah yang dihasilkan dari aktifitas kegiatan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang pesat. Sulitnya mengelola TPA dan dampak lingkungan yang besar dari TPA mengharuskan pengelolaan TPA yang lebih baik lagi terutama dalam mengelola sampah dengan daur ulang. Banyak dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang fokus pada pengelolaan dan pengurangan pencemaran serta melibatkan masyarakat agar berbasis komunitas dari sumber sampah sampai ke TPA. Direkomendasikan agar sistem pengelolaan sampah di Indonesia berbasis partisipasi komunitas dan tidak hanya mengandalkan TPA dengan sistem lahan urug. Sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat penting untuk dikembangkan karena hanya memerlukan biaya kecil, teknologi sederhana, mudah dioperasikan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan

sampah yang tidak komprehensif dari hilir dan melibatkan semua pihak menjadi hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini fokus kepada perlunya adanya pengelolaan sampah berbasis komunitas, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, hanya fokus kepada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon Purajaya.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian *field research* ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak, jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini *testing* itu dilakukan dengan mencari apakah data-data yang mendukung teori tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan, penelitian ini hendaknya menciptakan teori yang baru.<sup>18</sup>

#### a. Populasi dan Sampel

##### 1) Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga,

---

<sup>17</sup> Rizki Puteri Mahyudin, Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pembuangan Sampah), *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 3 No. 1, Juli 2017.

<sup>18</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obotr Indonesia, 2014), 12.



media dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam Skripsi ini populasinya adalah pekerja pengelolaan sampah Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat berjumlah 12 orang dimana 7 orang pekerja pengelolaan sampah dan 5 orang masyarakat.

## 2) Sampel

Sampel adalah sering di definisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan karena 2 (dua) hal yang pertama peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja dari populasi, yang kedua peneliti bermaksud generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang luas.<sup>20</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah direktur BUMP (Badan Usaha Milik Pekon) Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sumber data penelitian

### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan.<sup>21</sup> Data yang diambil berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti dan digambarkan sendiri

---

<sup>19</sup> Susiadi, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

<sup>20</sup> Nurul Zaria, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, ( Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2007 ), 20.

<sup>21</sup> Nasution, M.A, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi dari interview yang dilakukan peneliti. Dalam proposal skripsi penelitian ini dilakukan di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>22</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah yang di dapatkan dari lembaga atau instansi terkait dari aparaturnya Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan metode-metode tertentu yang relevan. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah :

a. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah penentuan sampel penelitian dengan menggunakan teknik-teknik penentuan sampel yang

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2015),12.

tersedia.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengamati kegiatan Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Metode observasi penelitian ini penulis menggunakan pengamatan secara tidak berstruktur, tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada aparaturnya Pekon Purajaya yang bekerja di bagian Badan Usaha Milik Pekon (Bum) Jaya Bersama Pekon Purajaya dan beberapa Masyarakat Pekon Purajaya. Wawancara baik dilakukan secara lisan maupun tertulis baik ke kepada aparaturnya Pekon Purajaya yang bekerja di bagian Badan Usaha Milik Pekon (Bum) Jaya Bersama Pekon Purajaya dan beberapa Masyarakat Pekon Purajaya.

---

<sup>23</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian survai*, (Jakarta: LP3S Indonesia, 2006),26.

<sup>24</sup>Burhan ashshofa, *metode penelitian hukum*, ( jakarta: PT rineka cipta, 2013 ),95.

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data dengan cara mencatatnya. Tujuan wawancara seperti ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau salah satu objek yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan berupa atatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Dengan demikian metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa catatan arsip yang ada. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan atas mengenai gambaran umum Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya.

#### b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus

---

<sup>25</sup>*Ibid*,274.

tertentu.<sup>26</sup> Pengelolaan data merupakan proses menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan data yang telah diolah. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengatur dan mengklarifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>27</sup> Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) Editing data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menandakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- 3) Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah di pahami dan di presentasikan.
- 4) Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

<sup>27</sup> Kartono dan Kartini, *pengantar metode research*, ( Bandung : Alumni, 1998 ), 86.

<sup>28</sup> Lexi L, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001).

<sup>29</sup> Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 161.



#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi :

- a. Bab pertama, Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitanya dengan pendahuluan skripsi ini sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- b. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi : Hukum Islam Dan Perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi : Sejarah, Geografi Dan Kondisi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung

Barat, Isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Bentuk-Bentuk Penerapan Dan Contoh-Contohnya Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Keberhasilan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Faktor Kelemahan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Faktor Pendukung Dan Kekurangan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

- d. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Pandangan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

- e. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Islam Dan Perkembangannya

#### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau disebut fiqh muncul sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu hadist sekitar akhir abad pertama hijrah, yaitu sejak munculnya para fuqaha dan ahli hadist setelah meninggalkannya, *Said Ibnu al-Musaiyah* dan *Abu Bakar Ibnu Abdur Rahman*. karena sejak itu bermunculanlah kumpulan ketetapan hukum yang tersusun dalam dokumen catatan secara sistematis dengan sebutan *fiqh* yang dijadikan sebagai objek pembelajaran tertentu dan terpisah dari hadist. Sehingga dikenal dan populerkan tahun 94 H Sebagai Tahun *Fuqoha*.<sup>30</sup>

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti

---

<sup>30</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Terjemahan oleh Agah Garmadi dari “*The Early Development of Islamic Jurisprudenc*”, Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad, 1970). Penerbit PUSTAKA ITB, 10, 1971., 1.

jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian islam yang secara umu dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum *Syara* atau *Syari'ah*.<sup>31</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Bahasan hukum dalam referensi ushul dan fiqh pada umumnya masih sering meninggalkan kesan kerancuan mengenai pengertian sumber hukum dan dalil hukum. Karena apa yang disebut sumber sering juga disebut dalil. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu, apa yang

---

<sup>31</sup> Ma'luf, Abu Lowis, *Al-Munjid*, Dar al-Masyreq, Bairut, 197., 82.



dimasudkan dengan dalil dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya dalam kajian hukum islam.

Memperhatikan batasan mengenai hukum Islam tersebut maka bicara soal hukum Islam tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang dalil hukum. untuk mengetahui dalil hukum itu sendiri perlu merujuk kepada sumber pokoknya yang baku, yakni al-Quran dan Sunnah.

Sumber hukum dimaksudkan di sini adalah suatu titik awal dimana didapatkan ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri. Untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi sumber hukum dalam Islamnya dapat ditemukan jawabannya melalui petunjuk sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci

bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayatayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa

dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

### 3. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam :

#### a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

#### 4. Tujuan Sistem Hukum Islam

sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

##### a. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

##### b. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

##### c. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.



d. Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

e. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

f. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

## 5. Klasifikasi Hukum Islam

Bertolak dan beranjak dari Sumber hukum dan mengacu pada tunjukan dalil maka di sepakati bahwa hukum Islam mencakup 2 bidang kajian hukum dalam Islam, Yaitu :

- a. Hukum Syara
- b. Hukum Fiqh

Hukum Syara adalah hukum yang dinyatakan langsung secara tekstual dalam ungkapan wahyu, jelaslah hukum syara itu tidak lain adalah hukum eksplisit nash Al-Quran dan atau Sunah. Sedangkan Fiqh adalah istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu.<sup>32</sup> Maksudnya bahwa kata fiqh itu adalah merupakan istilah yang diguakan sebagai sebutan bagi hukum hasil ilmiah. Dari sini dapat difahami bahwa hukum fiqh menurut Ahmad Hasan adalah hukum yang dihasilkan melalui proses dan kerja nalar ilmiah dari sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah.

## 6. Lingkup Kajian Hukum Islam

Kajian hukum Islam Menurut lingkup target kemaslahatan yang hendak dijangkau terbagi dalam 2 kelompok kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dunia dan kemaslahatn akhirat. Untuk ketentuan hukum kemaslahatan hidup diakhirat termasuk dalam cabang ibadah, yaitu

---

29. <sup>32</sup> Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar at-Talif, Cet Ke- 3., Mesir, 1964., 28-

masalah yang berkaitan dengan urusan pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan hukum yang menawarkan kemaslahatan hidup didunia, yaitu yang berkaitan dengan pengaturan pemeliharaan kemaslahatan sosial kemasyarakatan (sebagian ulama memasukkannya ke dalam kelompok cabang adat).<sup>33</sup> terbagi dalam beberapa cabang sesuai bidang permasalahannya, seperti masalah hubungan keluarga, hubungan perdata dan hubungan pidana.

Berdasarkan kemaslahatan yang hendak dicapai sebagai tujuan hukum dalam Islam itulah maka hukum Islam dikelompokkan ke dalam kelompok cabang ilmu hukum yang masing-masing mencakup beberapa disiplin ilmu hukum tertentu.<sup>34</sup>

a. Cabang hukum ibadah dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin ilmu hukum yaitu :

- 1) Hukum Ibadah shalat
- 2) Hukum Ibadah zakat
- 3) Hukum Ibadah puasa
- 4) Hukum Ibadah haji

b. Cabang hukum keluarga dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin ilmu hukum yaitu :

- 1) Hukum perkawinan
- 2) Hukum Waris

---

<sup>33</sup> Madzkur, Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, Pen. Al-Ashriyyah, Kuwait, 1978., 33.

<sup>34</sup> Jazuli, Prof. H.A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Press, Bandung, 2020., 3.

3) Hukum Pengampuan

c. Cabang hukum perdata dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin

ilmu hukum yaitu :

1) Hukum Dagang

2) Hukum Administrasi

d. Cabang hukum pidana dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin

ilmu hukum yaitu :

1) Hukum pidana

2) Hukum acara

3) Hukum Tatanegara dan Tata Pemerintahan

7. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam".<sup>35</sup> Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>36</sup> Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di perbolehkan dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).<sup>37</sup> Kata siyasah yang bersal dari kata sasa, yang berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)., 2.

<sup>36</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 22.

pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'ruf memberi batasan siyasah adalah " membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang Fiqh dan Siyasah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

#### a. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.



Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- 1) Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan).
- 2) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).
- 3) Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan).
- 4) Siyasah Harbiyyah (hukum perang).
- 5) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Qadha'iyyah (Peradilan).
- 2) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).
- 3) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).
- 4) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan)
- 2) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka diIndonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah (Politik Hukum).
- 3) Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah (Politik Peradilan).
- 4) Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) Siyasah Idariyyah Syar'iiyyah (Politik Administrasi Negara).
- 6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik Hubungan Internasional).
- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah (Politik Peperangan).<sup>38</sup>

Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau siyasah maliyah (politik ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai siyasah dusturiyah, dibidang kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaran ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),14.

yang empat. Salah satu objek kajian fiqh siyasah adalah siyasah dusturiyah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

#### b. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama)

Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini

juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.

#### c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu:

- 1) Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi

perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalail-dalai kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an, kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menetapkan hukum di negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat. Keempat, adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat. Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan hadist, adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini bisa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan



tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, dan budaya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- a) Bidang siyasah tashri'iyah, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al-'aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dan lain sebagainya.
- b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk dalamnya persoalan imamahi, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- c) Bidang siyasah qadlaih, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan oleh:

- a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.<sup>39</sup> Sedangkan para

---

<sup>39</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971., 157.

fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.

- b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).<sup>40</sup>
- d) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.<sup>41</sup>
- e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Prof. H. A.Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Jakarta, Kencana, 2004.,49.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 49.

<sup>42</sup> Dr. Wirjonno Projudikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, PT.Eresco, 1971.,17-18.

Walaupun demikian, ada juga diantara fuqaha dan ulama islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-farabi, Ibnu sina, Al-mawardi, Al-gazali, Ibnu rusydi, dan Khaldun.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dsar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

d. Dasar hukum siyasah dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam

menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

## 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segrenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>43</sup>

## 3. Ijma

Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.<sup>44</sup> Apabila

---

<sup>43</sup> Ridwan HR, Fiqh Politik; gagasan harapan dan kenyataan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 53.

<sup>44</sup> Khalat, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1997 M./26.

didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rosul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu barlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>45</sup> ( Q.S. An-Nisa' (4) : 59 )

#### 4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>46</sup> Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang

<sup>45</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015)

<sup>46</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

e. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah

Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqh siyasah yang di dalamnya membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *Amir dan Khalifah*. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas.

Berdasarkan al-quran dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthan tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.

Dalam hal Pengelolaan Sampah Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon Purajaya yang berperan sebagai



*Tanfidziyyah Syar'iyah* yaitu pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon Purajaya bertanggung jawab dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu melalui program kerjanya, Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon Purajaya dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

Wujud tanggung jawab Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon Purajaya sebagai *Tanfidziyyah Syar'iyah* yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah swt, namun dalam kepemimpinannya tanggung jawab harus selalu ada di hadapan manusia lainnya yang dipimpin dalam bentuk laporan kegiatan.

## **B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah**

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya *operasional* pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Lampung Barat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah ini disahkan pada tanggal 15 Oktober 2018 di Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Disahkan Langsung oleh bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus.<sup>47</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. Misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa didaur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan Sampah ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Lampung Barat sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan. berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Lampung Barat seutuhnya.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai:

1. Pengelolaan persampahan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, *konservasi*, *estetika* dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat
2. Perizinan di bidang persampahan, adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
3. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan atau komersial, fasilitas umum, fasilitas pendidikan/ sekolah, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan awal diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Begitu juga dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan Sampah. Dalam kegiatan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengelolaan Sampah. Sedangkan kegiatan pengelolaan Sampah oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dapat dilakukan secara *swakelola* atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan dan kebersihan. Di samping itu Pemerintah Daerah juga berhak untuk menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan dan menentukan besaran tarif *retribusi* pengelolaan persampahan. Peraturan ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat juga berperan aktif dalam masalah pengelolaan sampah ini

Dalam pengelolaan persampahan tidak hanya Pemerintah Daerah dan masyarakat saja yang terlibat, namun juga ada penyedia jasa pengelolaan persampahan yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Penyedia jasa pengelolaan persampahan inilah yang nantinya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan

pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, *konservasi*, *estetika* dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Sebelum melakukan pengelolaan sampah, penyedia jasa pengelolaan persampahan ini harus melakukan izin pelayanan pengelolaan persampahan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendapat izin pengelolaan persampahan sudah dapat dilakukan. Selama proses pengelolaan sampah, mereka harus melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap satu bulan sekali kepada instansi teknis.

Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib menjaga dan memelihara prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan, serta melakukan pemilahan sampah. Selain itu mereka dapat memungut biaya jasa pelayanan persampahan kepada pelanggan.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018  
Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan sampah yang harus dikelola yaitu :

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas :
  - a. Sampah rumah tangga
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
  - c. Sampah spesifik.
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana
  - d. Puing bongkaran bangunan
  - e. Sampah yang timbul secara periodik<sup>49</sup>

Pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5



Tugas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaansampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatansampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaansampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaansampah.<sup>51</sup>

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Bupati mempunyai kewenangan:

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 6

<sup>51</sup> Undang-undang peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, pasal 7

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berskala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Bupati.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 8

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah, dan
- b. Penanganan sampah.<sup>53</sup>
  - 1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:
    - a) Pembatasan timbulan sampah
    - b) Pendaauran ulang sampah, dan/atau
    - c) Pemanfaatan kembali sampah
  - 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
    - b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
    - c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
    - d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang,dan
    - e) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang
  - 3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 10

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat di guna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- 4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang,didaur ulang,dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2),ayat(3),dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.<sup>54</sup>

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.<sup>55</sup>

- a. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di pekon/kelurahan, kawasan, komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unti kerja OPD untuk mengelola sampah.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 11

<sup>55</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22

<sup>56</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 23

Didalam pasal 24 dijelaskan :

- 1) lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tingkat rukun tangga (RT) mempunyai tugas:
  - a) memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS,dan
  - b) Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- 2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
  - a) Mengkordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga, dan
  - b) Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke peratin/lurah.
- 3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tingkat pekon/kelurahan mempunyai tugas:
  - a) Menkordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga
  - b) Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga,dan
  - c) Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke camat.

4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan
- b) Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan, dan
- c) Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD atau BLUD yang membidangi persampahan.<sup>57</sup>

Setiap orang memiliki hak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.<sup>58</sup>

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 24

<sup>58</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 29



yang berwawasan lingkungan, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku, setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing, setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan, setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan, alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik, bupati wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.<sup>59</sup>

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait, pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait, melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain dan pemberian pendidikan dan pelatihan,

---

<sup>59</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 30

kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.<sup>60</sup>

Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan memasukan sampah ke dalam wilayah kabupaten.<sup>61</sup>

Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paal 46, sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (10 berupa:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Uang paksa, dan/atau
4. Pencabutan izin

Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.<sup>62</sup>

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana

---

<sup>60</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 45

<sup>61</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 46

<sup>62</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 56

dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran, selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup>Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 57

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahhab, Khalat, 1997 *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait.
- Ahmad Hasan, Ahmad, 1971, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Terjemahan oleh Agah Garmadi dari “*The Early Development of Islamic Jurisprudence*”, Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad, 1970). Penerbit PUSTAKA ITB.
- Al- Hafidz, Ahsin W, 1996. *Fiqh kesehatan*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2007
- Arikunto, Suharsini, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Ashshofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aswar, Azrul, 1996. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* ,Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya.
- Budiman Chandra, 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan* ,Jakarta: Pustaka Buku Kedokteran EGC, Cet Ke-1.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius Dan Sosrodihardjo, Soedjito, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI, 1999. *AL-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr. Wirjonno Projodikoro, 1971, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, PT. Eresco.
- Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Imron, 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karaya Ilmu ( Jakarta).
- Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group).
- Jazuli, Prof. H.A., 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Press, Bandung.
- Jindan, Khalid Ibrahim, 1999, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti).
- Kartini Dan Kartono, 1998. *pengantar metode research*, ( Bandung).
- L, Lexi, 200. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya).
- Lowis, Ma'luf Abu, *Al-Munjid*, Dar al-Masyreq, Bairut, 197.
- Madzkur, Muhammad Salam, 1978, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, Pen. Al-Ashriyyah, Kuwait.
- Muchtar Affandi, 1971, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung..
- Nasution, M.A, 1996. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramayanti, Resti, 2017. *Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Ridwan HR, 2010, *Fiqh Politik gagasan harapan dan kenyataan* (Jakatra: Raja Grafindo Persada).

- Saefuddin, 2013. *Sampah dan penanggulangannya*, Bandung: Titian Ilmu.
- Sarwono, Jonathan, 2010. *Pintar Menulis Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sholihin, Bunyana, 2018. *Metodologi penelitian syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 2006. *Metode penelitian survai*, Jakarta: LP3S Indonesia.
- Sukmadinata, Nana Syaodah, Metode Penelitian, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).
- Soekanto, Soejono, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supardi, 2006. *Meteorologi Penelitian*, ( Mataram : Yayasan Cerdas Pres).
- Supardi, Imam, 2000. *lingkungan hidup dan kelestariannya*, Bandung: PT Alumni..
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 2015 (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Usman, Husaini Dan Akbar, Setiady Purnomo, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Wahyudi Dede Dan Santoso Aji, 2019. *pemerintah kabupaten lampung barat profil pekon dan kelurahan tahun 2019*, lampung barat.
- Wield Harry Apriadji, 2006. *Memproses Sampah*, Bogor: Penerbit Swadaya.
- Wijana, Nyoman, 2014. *Biologi Dan Lingkungan*, Yogyakarta: Plantaxia.
- Zakiyuddin, Sya'ban, 1964, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar at-Talif, Cet Ke- 3., Mesir.
- Zakiyuddin, Sya'ban, 1964, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar at-Talif, Cet Ke- 3., Mesir.

### **Wawancara**

- Damdani, Wawancara dengan Manager Unit Sosial Yang Bergerak Di Bidang Pengelolaan Sampah Pekon Purajaya, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Darminah, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Purajaya, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Endang S, Wawancara dengan Petugas Pengelolaan Sampah Pada Tanggal 29 Oktober 2020, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Fajaria, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Purajaya, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Miswan, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Purajaya, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Samsu Kendar, Wawancara dengan Komisaris Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.

- Saptari, Wawancara dengan Petugas Penarik Sampah, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Sasmito Ansyori, Wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Sehardi, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Purajaya, pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Tasim, Wawancara dengan Petugas Penarik Sampah, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Zulfikri, Wawancara dengan Sekretaris Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.
- Zuriyatun, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Purajaya, Pekon Purajaya, Lampung Barat, 29 Oktober 2020.

### **Jurnal**

- Baping, Dominikus, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Hasil Dari Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 3 No.3, September 2015.
- Elamin, Muchammad Zamzami, Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Di Sanah Kecamatan Sreseh, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. II No. 4, Juli 2018.
- Mahyudin, Rizki Puteri, Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pembuangan Sampah), *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 3 No. 1, Juli 2017.
- Irwantoni, “peranan *Siyasah Syar’iyyah* dalam memahami nas-nas Agama”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h.270- 271.(On-Line), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (21 Januari 2021).
- Setyoadi, Nino Heri, Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor, *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 10 No. 1, Juli 2018.

### **Sumber on-line**

- <https://www.lampungbaratkab.go.id>. (11 Maret 2020).
- <http://Prodeskei.binapemdes.kemendagri.go.id/>